

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan isu sosial yang menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Tingginya angka kejahatan tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem keamanan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Sinaga & Anshori, 2022). Dalam negara berkembang, kriminalitas sering kali berkelindan dengan ketimpangan ekonomi, urbanisasi cepat, dan tekanan sosial. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi (Hafdzi, 2024). Oleh karena itu, kriminalitas tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan multidimensional, khususnya ekonomi.

Kriminalitas secara yuridis dipahami sebagai setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan diancam dengan sanksi seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perspektif hukum, kriminalitas tidak hanya mencakup tindakan kekerasan terhadap individu, tetapi juga berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik, ketertiban umum, serta aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat dan negara (Mustofa, 2021). Oleh karena itu, kriminalitas merupakan fenomena hukum sekaligus sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan distribusi sumber daya ekonomi.

Perbedaan karakter kriminalitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan menjadi semakin kontras ketika dilihat dalam konteks DKI Jakarta sebagai pusat metropolitan dan magnet migrasi nasional. Berbeda dengan desa yang memiliki ikatan sosial kuat dan kontrol sosial informal yang relatif efektif, Jakarta menghadapi arus urbanisasi tinggi yang mendorong peningkatan kepadatan penduduk serta heterogenitas sosial yang kompleks. Arus migrasi dari berbagai daerah ke Jakarta memperketat kompetisi di pasar kerja metropolitan, baik pada sektor formal maupun informal, sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang tinggi, terutama bagi pendatang dengan keterbatasan keterampilan dan akses sumber daya. Ketimpangan antara penduduk yang memiliki daya saing ekonomi kuat dengan kelompok rentan yang terjebak dalam persaingan sektor informal semakin memperbesar potensi kerentanan sosial. Dalam situasi kompetisi ekonomi yang intens dan biaya hidup yang tinggi, kriminalitas di Jakarta tidak hanya merefleksikan persoalan keamanan semata, melainkan juga menjadi manifestasi dari tekanan struktural akibat urbanisasi, persaingan kerja, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang melekat pada karakter kota metropolitan (Yura et al., 2021).

Indonesia sebagai negara dengan laju urbanisasi yang tinggi menghadapi tantangan kriminalitas yang semakin kompleks, terutama di wilayah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diiringi pemerataan kesejahteraan menimbulkan kesenjangan sosial yang nyata. Kondisi ini menciptakan kelompok masyarakat rentan yang mudah terdorong pada aktivitas kriminal.

Situasi tersebut berpotensi memperbesar peluang terjadinya tindak kejahatan (Carolin & Kurniati, 2025).

Dalam hal ekonomi perkotaan, konsep *expected utility* menjadi sangat relevan dalam menjelaskan kecenderungan individu melakukan kejahatan. Tingginya pengangguran, rendahnya pendapatan riil, serta ketidakpastian ekonomi meningkatkan daya tarik aktivitas kriminal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja dengan upah yang layak, individu cenderung mencari sumber pendapatan lain, termasuk melalui aktivitas ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalitas dapat muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem ekonomi dalam menyediakan kesempatan ekonomi yang adil dan inklusif (Syam et al., 2024).

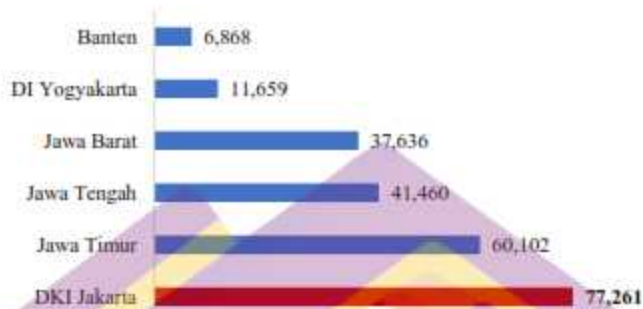
Disamping itu, teori *economic of crime* juga menekankan pentingnya konsep *opportunity cost*, yaitu biaya peluang yang hilang ketika seseorang memilih melakukan kejahatan dibandingkan bekerja secara legal. Individu dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas umumnya memiliki *opportunity cost* yang rendah, sehingga risiko kehilangan pendapatan legal akibat hukuman pidana menjadi relatif kecil. Situasi ini memperbesar kecenderungan kelompok masyarakat tertentu untuk terlibat dalam tindak kriminal, khususnya di wilayah perkotaan dengan kompetisi kerja yang intens serta tingginya biaya hidup (Syam et al., 2024).

Meskipun demikian, pendekatan rasional dalam teori ekonomi kejahatan tidak sepenuhnya mampu menjelaskan seluruh fenomena kriminalitas.

Beberapa bentuk kejahatan, terutama kejahatan kekerasan, sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional, lingkungan sosial, dan tekanan struktural yang bersifat non-ekonomi. Oleh karena itu, analisis kriminalitas perlu dilengkapi dengan pendekatan sosial dan struktural agar mampu menggambarkan hubungan kompleks antara kondisi ekonomi dan perilaku kriminal secara lebih komprehensif. Hal ini menjadi dasar penting dalam merumuskan variabel-variabel ekonomi yang relevan dalam penelitian kriminalitas di wilayah DKI Jakarta.

Fenomena kriminalitas di wilayah perkotaan Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan intensitas aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional menjadi wilayah dengan dinamika kriminalitas yang paling kompleks. Fenomena ini terlihat dari maraknya kasus kejahatan jalanan, kejahatan properti, serta kejahatan ekonomi yang berkembang seiring dengan tingginya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan. Perkembangan kawasan permukiman yang tidak merata, meningkatnya biaya hidup, serta kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah menciptakan kondisi sosial yang rentan terhadap tindak kriminal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas di DKI Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keamanan semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat perkotaan (Taena & Yusuf, 2025).

Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah di Pulau Jawa Tahun 2024



Gambar 1. 1 Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah di Pulau Jawa
Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Dari Gambar 1.1, jumlah kejahatan tertinggi di Pulau Jawa tercatat pada wilayah hukum DKI Jakarta dengan total 77.261 kasus, jauh melampaui provinsi lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur dengan 60.102 kasus, disusul Jawa Tengah sebesar 41.460 kasus dan Jawa Barat sebesar 37.636 kasus. Sementara itu, DI Yogyakarta dan Banten mencatat angka yang relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 11.659 dan 6.868 kasus. Data kriminalitas antarprovinsi menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antarwilayah di Indonesia. Beberapa provinsi mencatat jumlah kejahatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Perbedaan ini tidak terlepas dari karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki dinamika kriminalitas yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas memiliki pola spasial yang berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi daerah (Dede et al., 2019).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus kriminalitas dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa. Tingginya angka kriminalitas di Jakarta menunjukkan besarnya tantangan sosial ekonomi yang dihadapi wilayah ibu kota negara. Jika dianalisis menurut kondisi sosial ekonominya, wilayah dengan angka kejahatan tertinggi seperti Polda DKI Jakarta dan Jawa Timur di pulau Jawa merupakan wilayah dengan populasi yang padat, pusat ekonomi yang besar, dan aktivitas urban yang dinamis (Badan Pusat Statistik, 2025). Jakarta sebagai ibu kota negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang menarik arus migrasi dari berbagai daerah. Tingginya mobilitas penduduk meningkatkan kompleksitas permasalahan sosial. Persaingan ekonomi yang ketat turut menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut (Stiawan & Yusuf, 2025).



Gambar 1. 2 Tingkat Kriminalitas DKI Jakarta 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tingkat kriminalitas dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan rentang nilai indeks selama periode 2022–2024. Menurut klasifikasi tingkat kriminalitas berbasis interval data, kategori rendah ditetapkan pada nilai $\leq 2,50$, kategori sedang pada rentang 2,51–3,50, dan kategori tinggi pada nilai $> 3,50$. Berdasarkan klasifikasi tersebut, wilayah seperti Jakarta Selatan pada tahun 2023 dengan nilai 4,38 serta Jakarta Timur pada tahun 2022 dan 2023 termasuk dalam kategori tinggi. Sementara itu, Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada beberapa periode berada dalam kategori sedang, sedangkan Kepulauan Seribu secara konsisten berada dalam kategori rendah.

Dari Gambar 1.2, tingkat kriminalitas di masing-masing wilayah administrasi DKI Jakarta menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, Jakarta Timur mencatat tingkat kriminalitas sebesar 3,60, lebih tinggi dibandingkan Jakarta Selatan (3,43), Jakarta Barat (3,08), Jakarta Utara (2,93), dan Jakarta Pusat (2,71). Kepulauan Seribu menunjukkan angka yang sangat rendah bahkan bernilai negatif (-0,20), yang mengindikasikan penurunan kasus dibanding periode sebelumnya. Perbedaan ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah, di mana Jakarta Timur dan Selatan memiliki kepadatan penduduk tinggi serta aktivitas ekonomi yang dinamis sebagai bagian dari kawasan penyangga pusat bisnis dan permukiman padat.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan kriminalitas di Jakarta Selatan menjadi 4,38 atau naik sebesar 0,95 poin dibanding tahun sebelumnya.

Jakarta Timur juga mengalami kenaikan menjadi 3,90 atau meningkat sebesar 0,30 poin. Sebaliknya, Jakarta Pusat mengalami penurunan dari 2,71 menjadi -1,60, menunjukkan kontraksi signifikan sebesar 4,31 poin. Jakarta Barat turun menjadi 2,23, sementara Jakarta Utara turun menjadi 2,56. Kepulauan Seribu juga mengalami penurunan lebih dalam menjadi -1,60. Kenaikan di wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi mengindikasikan adanya korelasi antara dinamika pasar kerja metropolitan, mobilitas penduduk, serta intensitas interaksi sosial-ekonomi dengan peluang terjadinya tindak kriminal.

Pada tahun 2024, kondisi kriminalitas cenderung lebih stabil dan merata. Jakarta Selatan mengalami penurunan dari 4,38 menjadi 2,74 atau turun sebesar 1,64 poin. Jakarta Timur turun menjadi 2,68, Jakarta Barat meningkat kembali menjadi 2,77, sedangkan Jakarta Utara turun tipis menjadi 2,45. Kepulauan Seribu menunjukkan perbaikan dari -1,60 menjadi -0,12, meskipun masih berada pada tren penurunan secara agregat. Stabilitas relatif ini dapat mencerminkan penyesuaian pascapemulihan ekonomi serta dinamika kompetisi ekonomi yang mulai menemukan keseimbangan baru di tengah tekanan biaya hidup yang tinggi di ibu kota.

Fluktuasi kriminalitas selama periode tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi pascapemulihan pandemi, tingginya mobilitas penduduk akibat urbanisasi, serta intensitas kompetisi di pasar kerja metropolitan. Wilayah dengan konsentrasi pusat bisnis, perdagangan, dan permukiman padat cenderung menunjukkan tingkat kriminalitas yang lebih dinamis dibandingkan wilayah dengan karakter geografis terbatas seperti

Kepulauan Seribu. Hal ini menegaskan bahwa kriminalitas di DKI Jakarta tidak berdiri sendiri sebagai fenomena keamanan, melainkan berkelindan dengan tekanan urban, kompetisi ekonomi, serta kepadatan aktivitas sosial yang tinggi.

Jakarta memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah lain karena menjadi pusat konsentrasi modal, investasi, dan peluang usaha nasional. Namun, konsentrasi tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya biaya hidup, persaingan kerja yang ketat, serta ketimpangan pendapatan. Arus migrasi yang tinggi menjadikan Jakarta sebagai arena kompetisi terbuka antara pendatang dan penduduk lama dalam memperebutkan akses pekerjaan, hunian, dan sumber daya ekonomi. Tidak semua penduduk mampu beradaptasi dengan tekanan ekonomi perkotaan yang tinggi, sehingga ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan menciptakan potensi konflik sosial dan kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan (Ningrum et al., 2024).

Dari sisi sosial, kriminalitas berkontribusi terhadap melemahnya kohesi sosial dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Di wilayah dengan tingkat kompetisi ekonomi tinggi, rasa tidak aman dapat memperkuat segregasi sosial serta menurunkan partisipasi komunitas. Kelompok berpenghasilan rendah yang menghadapi tekanan biaya hidup dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Kondisi ini berpotensi memperkuat siklus kemiskinan perkotaan dan memperlebar ketimpangan sosial, sehingga kriminalitas tidak hanya menjadi akibat dari

permasalahan sosial ekonomi, tetapi juga faktor yang memperparah ketimpangan dalam pembangunan (Yura et al., 2021).

Dampak kriminalitas terhadap pembangunan menunjukkan bahwa persoalan kejahatan di kota metropolitan tidak dapat ditangani semata-mata melalui pendekatan represif dan keamanan. Upaya penanggulangan perlu diarahkan pada kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, khususnya dalam memperkuat akses pekerjaan, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mengurangi tekanan ekonomi kelompok rentan. Analisis terhadap faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kriminalitas menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga merespons kompetisi ekonomi dan tekanan urban yang melekat pada karakter DKI Jakarta (Yura et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian mengenai determinan ekonomi kriminalitas memiliki urgensi strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hunian layak menjadi salah satu indikator krusial dalam kualitas hidup masyarakat perkotaan. Di wilayah dengan laju urbanisasi tinggi seperti Jakarta, keterbatasan lahan, kompetisi ruang hunian, serta tingginya harga properti menyebabkan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di permukiman padat dan tidak layak huni. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap sumber daya kota dan memperlihatkan bagaimana tekanan kompetisi ekonomi turut memengaruhi kualitas tempat tinggal masyarakat (Rizkita et al., 2025).

Dari perspektif kriminologi, kondisi hunian yang tidak layak berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas melalui melemahnya kontrol sosial dan meningkatnya disorganisasi sosial. Lingkungan permukiman yang padat, kumuh, dan minim pengawasan sosial cenderung menciptakan ruang yang kondusif bagi terjadinya tindak kriminal, terutama di wilayah metropolitan dengan mobilitas tinggi. Teori disorganisasi sosial menjelaskan bahwa ketidakteraturan lingkungan fisik dan sosial dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Dengan demikian, hunian tidak layak menjadi salah satu faktor struktural yang berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas di wilayah metropolitan seperti ibu kota negara (Rizkita et al., 2025).



Gambar 1. 3 Persentase Rumah Tangga dengan Hunian Layak di DKI Jakarta Tahun 2022–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan grafik tingkat hunian layak, pada tahun 2022 Kepulauan Seribu memiliki nilai sebesar 2,67, kemudian meningkat signifikan menjadi

4,41 pada tahun 2023 atau naik sebesar 1,74 poin. Pada tahun 2024 nilai tersebut sedikit menurun menjadi 4,39 atau turun sebesar 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tajam pada 2023 dapat dikaitkan dengan perbaikan kualitas permukiman serta intervensi pembangunan infrastruktur dasar, sedangkan penurunan tipis pada 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil setelah fase peningkatan sebelumnya.

Jakarta Selatan mencatat nilai hunian layak sebesar 3,82 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 4,02 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,20 poin, sebelum kembali turun tipis menjadi 4,00 pada tahun 2024. Fluktuasi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa kualitas hunian di wilayah tersebut cenderung stabil dengan perbaikan yang moderat. Sementara itu, Jakarta Timur mengalami peningkatan dari 3,66 pada tahun 2022 menjadi 4,03 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,37 poin, namun menurun kembali menjadi 3,97 pada tahun 2024 atau berkurang sebesar 0,06 poin. Pola ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hunian pascapemulihan ekonomi, meskipun keberlanjutannya masih menghadapi tantangan akibat kepadatan permukiman yang tinggi.

Di Jakarta Pusat, tingkat hunian layak meningkat dari 3,45 pada tahun 2022 menjadi 3,81 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,36 poin, kemudian menurun menjadi 3,70 pada tahun 2024 atau turun sebesar 0,11 poin. Penurunan ini dapat berkaitan dengan keterbatasan lahan serta tingginya tekanan permukiman di kawasan pusat aktivitas ekonomi. Jakarta Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 3,63 pada tahun 2022

menjadi 4,17 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,54 poin, lalu sedikit menurun menjadi 4,10 pada tahun 2024. Kenaikan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pembangunan kawasan hunian baru serta revitalisasi lingkungan permukiman perkotaan.

Adapun Jakarta Utara mengalami tren peningkatan yang lebih konsisten, dari 3,13 pada tahun 2022 menjadi 3,97 pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,84 poin, dan kembali meningkat menjadi 4,01 pada tahun 2024. Perbaikan bertahap ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hunian, meskipun wilayah pesisir tersebut masih menghadapi tantangan lingkungan dan kepadatan penduduk. Secara umum, tahun 2023 menjadi periode peningkatan hunian layak di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta, yang kemungkinan dipengaruhi oleh percepatan pembangunan serta pemulihan ekonomi pascapandemi.

Perbedaan tingkat hunian layak antarwilayah mencerminkan dinamika urbanisasi dan kompetisi ruang hunian di kota metropolitan. Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi dan akses infrastruktur yang lebih baik cenderung memiliki kualitas hunian yang lebih tinggi, sementara kawasan dengan kepadatan penduduk besar menghadapi tekanan keterbatasan lahan dan tingginya biaya properti. Ketimpangan akses terhadap hunian layak ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perkotaan di Jakarta belum sepenuhnya diikuti pemerataan kualitas tempat tinggal, sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas sosial serta meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perkotaan.

Kemiskinan merupakan faktor ekonomi utama yang sering dikaitkan dengan tingkat kriminalitas suatu wilayah. Secara konseptual, kemiskinan dipandang bukan hanya sebagai kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan ekonomi. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perdesaan, karena tingginya biaya hidup dan persaingan ekonomi yang ketat. Kondisi ini menyebabkan kelompok masyarakat miskin perkotaan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan pokok harian (Rizkita et al., 2025).

Tekanan ekonomi akibat kemiskinan bisa mendorong seseorang guna melakukan tindakan kriminal sebagai strategi bertahan hidup. Dalam kerangka teori ekonomi kejahatan, individu yang berada dalam kondisi kemiskinan cenderung memiliki alternatif ekonomi yang terbatas, sehingga aktivitas kriminal dipersepsikan sebagai pilihan rasional untuk memperoleh pendapatan. Berbagai penelitian empiris mengindikasikan bahwasannya wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi biasanya mempunyai angka kriminalitas yang lebih besar, terutama kejahatan jalanan dan kejahatan properti (Kuciswara et al., 2021). Maka dari itu, kemiskinan menjadi variabel krusial dalam menganalisis dinamika kriminalitas di DKI Jakarta.



Gambar 1. 4 Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2022–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan grafik kemiskinan, Kepulauan Seribu pada tahun 2022 yakni 2,65, kemudian turun menjadi 2,57 pada 2023 atau berkurang 0,08 poin. Pada 2024 nilainya tetap sebesar 2,57 sehingga tidak mengalami perubahan. Stabilitas ini menunjukkan kondisi kemiskinan yang relatif terkendali di wilayah tersebut. Jakarta Selatan pada tahun 2022 sebesar 1,26, kemudian turun menjadi 1,13 pada 2023 atau berkurang 0,13 poin. Pada 2024 kembali turun menjadi 1,11 atau menurun 0,02 poin. Penurunan konsisten ini menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah dengan struktur ekonomi yang relatif kuat.

Jakarta Timur pada tahun 2022 sebesar 3,66, meningkat menjadi 4,03 pada 2023 atau naik 0,37 poin. Pada 2024 sedikit turun menjadi 3,97 atau berkurang 0,06 poin. Kenaikan pada 2023 dapat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan kenaikan biaya hidup, sedangkan penurunan di 2024

menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Jakarta Pusat pada tahun 2022 sebesar 3,45, meningkat menjadi 3,81 pada 2023 atau naik 0,36 poin, kemudian turun menjadi 3,70 pada 2024 atau berkurang 0,11 poin. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi perkotaan.

Jakarta Barat pada tahun 2022 sebesar 3,63, meningkat menjadi 4,17 pada 2023 atau naik 0,54 poin. Pada 2024 kembali turun menjadi 4,10 atau berkurang 0,07 poin. Kenaikan tajam pada 2023 dapat dikaitkan dengan tekanan ekonomi dan inflasi, khususnya pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Jakarta Utara pada tahun 2022 sebesar 3,13, meningkat menjadi 3,97 pada 2023 atau naik 0,84 poin. Pada 2024 kembali meningkat menjadi 4,01 atau naik 0,04 poin. Kenaikan bertahap ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat di wilayah tersebut. Secara umum, tahun 2023 menunjukkan peningkatan kemiskinan di sebagian besar wilayah DKI Jakarta sebelum mengalami sedikit penurunan atau stabilisasi pada 2024. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan dampak lanjutan pemulihan ekonomi, inflasi, serta penyesuaian harga kebutuhan pokok di wilayah metropolitan.

Grafik kemiskinan memperlihatkan dinamika yang fluktuatif selama periode pengamatan. Meskipun terdapat kecenderungan perbaikan di beberapa wilayah, tingkat kemiskinan di wilayah tertentu masih relatif lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Perbedaan ini mengindikasikan bahwasannya distribusi kesejahteraan di DKI Jakarta belum sepenuhnya merata. Wilayah

dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi umumnya menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah biaya hidup perkotaan yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menciptakan kerentanan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang inklusif.

Hubungan antara pendidikan dan kriminalitas dapat dijelaskan melalui konsep *opportunity cost*. Individu dengan tingkat pendidikan rendah memiliki *opportunity cost* yang lebih kecil ketika melakukan kejahatan, karena potensi kehilangan pendapatan legal relatif rendah. Kondisi ini meningkatkan kecenderungan individu dengan pendidikan rendah untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Peningkatan tingkat pendidikan memiliki korelasi negatif dengan kriminalitas, sehingga pendidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam menekan angka kejahatan di wilayah perkotaan, termasuk di ibu kota negara (Saputra, 2023).



Gambar 1. 5 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk DKI Jakarta
Tahun 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Dari grafik tingkat pendidikan, Kepulauan Seribu pada tahun 2022 sebesar 2,20. Pada tahun 2023 nilainya tetap 2,20 sehingga tidak mengalami perubahan. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,23 atau naik sebesar 0,03 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan akses atau partisipasi pendidikan, meskipun peningkatannya relatif kecil dibanding wilayah lain. Jakarta Selatan pada tahun 2022 sebesar 2,46, dan pada 2023 tetap di angka 2,46 sehingga tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,48 atau naik sebesar 0,02 poin. Stabilitas ini menunjukkan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi kuat cenderung memiliki tingkat pendidikan yang sudah relatif tinggi dan stabil.

Jakarta Timur pada tahun 2022 yakni 2,46, meningkat menjadi 2,47 pada 2023 atau naik sebesar 0,01 poin. Pada 2024 kembali meningkat menjadi 2,48 atau bertambah 0,01 poin. Kenaikan bertahap ini mengindikasikan terdapat peningkatan kualitas SDM secara gradual. Jakarta Pusat pada tahun 2022 yakni 2,44, meningkat menjadi 2,45 pada 2023 atau naik 0,01 poin, dan pada 2024 tetap di angka 2,45 sehingga tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan kondisi pendidikan yang relatif stabil.

Jakarta Barat pada tahun 2022 yakni 2,41, meningkat menjadi 2,42 pada 2023 atau naik 0,01 poin, dan pada 2024 tetap di angka 2,42. Peningkatan yang sangat kecil ini mengindikasikan perbaikan yang berjalan lambat. Jakarta Utara pada tahun 2022 sebesar 2,38, dan nilainya tetap sama pada 2023 dan 2024 sehingga tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan stagnasi dalam peningkatan capaian pendidikan di wilayah tersebut. Secara umum, tingkat

pendidikan di DKI Jakarta menunjukkan tren stabil dengan kenaikan yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di wilayah metropolitan sudah berada pada level yang relatif mapan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Grafik tingkat pendidikan menunjukkan adanya tren peningkatan yang relatif konsisten di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, perbedaan capaian antarwilayah masih terlihat, yang menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Kondisi tersebut penting dicermati karena pendidikan berperan sebagai modal manusia yang menentukan peluang ekonomi individu. Ketimpangan tingkat pendidikan dapat berdampak pada variasi kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan formal dan pendapatan yang stabil.

Pengeluaran masyarakat sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi riil yang mencerminkan kemampuan konsumsi rumah tangga. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, rata-rata pengeluaran masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain akibat mahal biaya hidup, termasuk kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, dan layanan publik. Tingginya pengeluaran tidak selalu diiringi dengan peningkatan pendapatan yang seimbang, sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah (Febriani, 2025).

Tekanan ekonomi akibat tingginya pengeluaran rumah tangga dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindakan kriminal, terutama kejahatan yang

bersifat oportunistik. Ketika pengeluaran melebihi kemampuan pendapatan, individu menghadapi risiko ketidakstabilan ekonomi yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, rata-rata pengeluaran masyarakat menjadi variabel penting untuk memahami bagaimana tekanan biaya hidup perkotaan berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas. Oleh karena itu, analisis kriminalitas di ibu kota negara perlu mempertimbangkan indikator pengeluaran masyarakat sebagai representasi kondisi ekonomi aktual penduduk (Febriani, 2025).



Gambar 1. 6 Pengeluaran Per Kapita DKI Jakarta Tahun 2022–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan grafik pengeluaran masyarakat, Kepulauan Seribu pada tahun 2022 sebesar 14,09 dan tetap sama pada 2023. Namun pada 2024 meningkat menjadi 14,16 atau naik sebesar 0,07 poin. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya biaya kebutuhan pokok dan inflasi di wilayah kepulauan. Jakarta Selatan pada tahun 2022 sebesar 14,79, meningkat menjadi 14,82 pada 2023 atau naik 0,03 poin. Pada 2024 kembali meningkat menjadi

15,00 atau bertambah 0,18 poin. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan daya beli sekaligus tingginya biaya hidup di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Jakarta Timur pada tahun 2022 sebesar 14,59, meningkat menjadi 14,74 pada 2023 atau naik 0,15 poin, namun pada 2024 sedikit turun menjadi 14,70 atau berkurang 0,04 poin. Penurunan ini bisa mencerminkan penyesuaian konsumsi rumah tangga akibat tekanan ekonomi. Jakarta Pusat pada tahun 2022 sebesar 14,54, meningkat menjadi 14,70 pada 2023 atau naik 0,16 poin, dan kembali naik menjadi 14,71 pada 2024 atau bertambah 0,01 poin. Kenaikan konsisten ini mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan konsumsi di pusat kota.

Jakarta Barat pada tahun 2022 sebesar 14,84, meningkat menjadi 14,92 pada 2023 atau naik 0,08 poin, kemudian turun menjadi 14,82 pada 2024 atau berkurang 0,10 poin. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh penyesuaian pola konsumsi atau kondisi ekonomi rumah tangga. Jakarta Utara pada tahun 2022 sebesar 14,85, meningkat menjadi 14,97 pada 2023 atau naik 0,12 poin, namun pada 2024 sedikit turun menjadi 14,93 atau berkurang 0,04 poin. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika konsumsi yang dipengaruhi oleh tekanan biaya hidup dan kondisi ekonomi wilayah pesisir. Secara umum, pengeluaran masyarakat di DKI Jakarta cenderung meningkat pada tahun 2023 dan mengalami penyesuaian pada tahun 2024. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi.

Berdasarkan grafik pengeluaran masyarakat, terlihat adanya tren peningkatan secara umum pada seluruh wilayah administrasi. Peningkatan ini mencerminkan tingginya biaya hidup di wilayah metropolitan sekaligus menunjukkan daya beli yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Namun demikian, kenaikan pengeluaran tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata, karena dapat pula dipengaruhi oleh inflasi dan tekanan harga kebutuhan pokok. Perbedaan tingkat pengeluaran antarwilayah menunjukkan variasi kemampuan ekonomi rumah tangga, yang berpotensi menciptakan ketimpangan sosial apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

Meski banyak penelitian telah mengeksplorasi pengaruh antara kondisi ekonomi dan tingkat kriminalitas di berbagai negara, temuan empiris masih menunjukkan hasil yang beragam tergantung konteks geografis dan indikator yang digunakan. Penelitian oleh Gazilas (2024) yang mengkaji 15 negara Eropa menemukan bahwa indikator-indikator ekonomi seperti *GDP per capita* dan inklusi keuangan memiliki hubungan negatif dengan tingkat pembunuhan, sedangkan tingkat pengangguran menunjukkan hubungan positif dengan kriminalitas dalam konteks negara-negara maju Eropa, namun mekanisme pengaruhnya belum sepenuhnya dibahas dalam ranah konteks negara berkembang maupun di wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan variabel-variabel ekonomi makro sekaligus perbedaan struktur sosial ekonomi dalam analisis kriminalitas, tetapi belum menyentuh secara spesifik bagaimana

karakteristik ekonomi suatu ibu kota negara memengaruhi dinamika kriminalitas. Gap ini menunjukkan perlunya kajian yang memperluas analisis determinan ekonomi pada kota metropolitan dengan tekanan urbanisasi tinggi dan ketimpangan sosial yang tajam, terutama dalam kasus IKN sebagai ibu kota baru yang memiliki dinamika ekonomi yang berbeda dengan kota-kota tradisional di negara lain.

Selain itu, penelitian Shafiq & Ali (2022) studi panel 7 negara yang menunjukkan hubungan jangka panjang antara pengangguran dan tingkat kriminalitas, pendekatan tersebut masih relatif jarang diaplikasikan pada analisis kriminalitas di wilayah ibu kota negara yang berdampak langsung pada kebijakan nasional. Riset semacam ini umumnya menggunakan data multi-negara dan jangka waktu panjang tanpa fokus pada variabel ekonomi spesifik yang relevan dengan konteks urban besar, seperti struktur lapangan kerja sektor formal dan informal, ketimpangan pendapatan di daerah metropolitan, serta mobilitas penduduk masuk yang tinggi. Kekosongan ini membuka ruang bagi penelitian yang mengeksplorasi pengaruh faktor ekonomi makro dan mikro secara simultan dalam hal DKI Jakarta.

Berdasarkan kondisi sosial-ekonomi perkotaan yang padat, ketimpangan pendapatan, dan tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta sebagai ibu kota negara, maka perlu dianalisis berbagai faktor ekonomi yang memengaruhi kriminalitas di wilayah metropolitan. Hal tersebut merujuk pada judul penelitian "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di DKI Jakarta".

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena kriminalitas di DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-ekonomi yang kompleks di wilayah perkotaan. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dasar serta tekanan hidup di ibu kota menciptakan ruang bagi terjadinya pelanggaran hukum. Munculnya berbagai permasalahan struktural seperti keterbatasan hunian, jerat kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga ketidakseimbangan pengeluaran rumah tangga menjadi faktor krusial yang saling berkelindan dalam memengaruhi stabilitas keamanan. Berdasarkan kompleksitas masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hunian layak terhadap kriminalitas di DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di DKI Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap kriminalitas di DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh hunian layak terhadap kriminalitas di DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di DKI Jakarta.

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di DKI Jakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran masyarakat terhadap kriminalitas di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi kriminalitas dan studi sosial perkotaan. Temuan studi diharapkan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara faktor-faktor ekonomi dengan tingkat kriminalitas di kota besar. Selain itu, studi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin menganalisis determinan sosial-ekonomi terhadap perilaku kriminal di Indonesia maupun negara lain.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Temuan studi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat ataupun daerah dalam merancang kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih responsif pada masalah kriminalitas. Dengan mengkaji faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh pada kriminalitas, pemerintah bisa melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran, seperti program peningkatan lapangan kerja, redistribusi kesejahteraan, dan peningkatan kualitas layanan sosial untuk menekan tingkat kriminalitas.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan akademik dan profesional, khususnya dalam hal analisis data ekonomi dan sosial, penyusunan penelitian ilmiah, serta pemahaman tentang interaksi antara faktor ekonomi dan perilaku kriminal. Pengalaman ini juga memperkuat kompetensi peneliti dalam menerapkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif di lapangan.

1.4. Sistematika Bab

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menyajikan dasar dan arah penelitian secara umum.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang digunakan, serta hipotesis penelitian. Bab ini berfungsi untuk memperkuat dasar teoritis dan empiris penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang diterapkan pada studi, termasuk objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik

analisis data. Bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana studi dijalankan secara sistematis serta ilmiah.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil analisis data yang didapat, kemudian membahas temuan studi secara kritis. Bab ini mengaitkan temuan studi dengan teori dan kerangka pemikiran yang telah dibahas pada Bab II.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama studi serta saran yang dapat diberikan dari temuan studi. Bab ini juga menegaskan kontribusi studi bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

